

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Indonesia telah menjadi bagian integral dari kehidupan perkotaan, dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang sering kali tidak dapat ditemukan di toko-toko formal (Pranata & Purbadi, 2020). Meskipun kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal sangat signifikan, keberadaan PKL yang tidak teratur sering kali menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan. Berbagai masalah atau konflik yang timbul dari kehadiran Pedagang Kaki Lima ini adalah salah satunya kemacetan (Ismanidar et al., 2016).

Selain kemacetan, ketidak teraturan dalam penataan PKL juga menyebabkan gangguan terhadap kinerja umum dan estetika lingkungan. Banyak PKL yang membangun bangunan semi permanen atau menggunakan peralatan dagang yang mencolok, sehingga menciptakan kesan semrawut dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan. Secara ideal, penataan PKL harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah seperti Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Satpol PP, Kecamatan, PKL sendiri, serta masyarakat sekitar, dan instansi terkait. Pemerintah berkewajiban mengatur, membina, dan mengawasi keberadaan PKL melalui kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. PKL harus berperan aktif dalam menaati peraturan dan berpartisipasi dalam proses pengaturan. Masyarakat dan pengguna ruang

publik juga memiliki peran dalam memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kenyamanan publik.

Pemerintah terus berusaha untuk melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) hal ini tercantum pada Visi Inonesia Emas 2045 yaitu mendorong UMKM naik kelas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Perpres no.125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menekankan pentingnya pengaturan PKL melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi semua pengguna jalan. Dalam peraturan ini, pemerintah daerah berkewajiban untuk menetapkan lokasi-lokasi tertentu sebagai tempat berjualan bagi PKL, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan gangguan terhadap pengguna jalan lainnya. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 juga memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengaturan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL dengan mendirikan lokasi yang sesuai, serta menumbuhkan kemampuan usaha mereka menjadi lebih mandiri dan berkelanjutan. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali menemui kendala. Banyak PKL yang tetap beroperasi tanpa izin resmi atau di lokasi yang tidak diperbolehkan,

seperti trotoar dan bahu jalan, sehingga menimbulkan konflik antara pedagang, pengguna jalan, dan pemerintah.

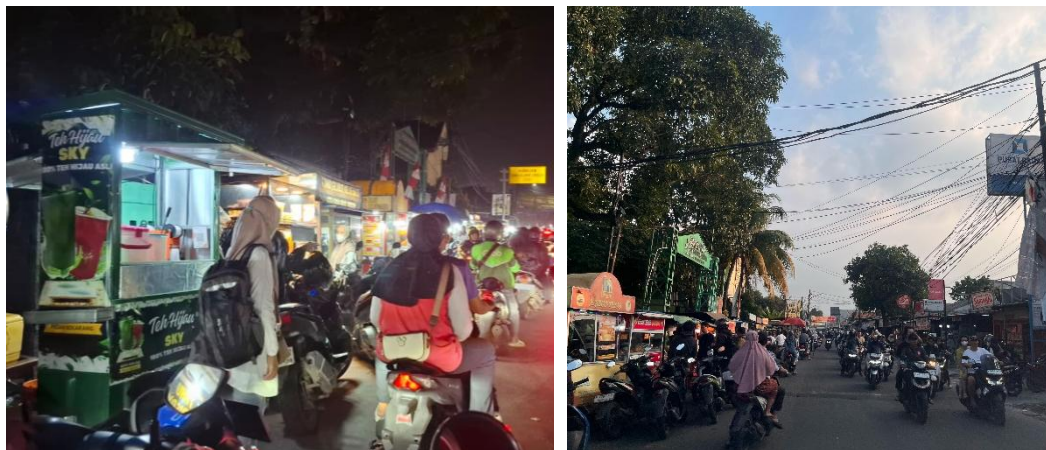
Penataan suatu wilayah yang ada di setiap provinsi, kabupaten/kota ternyata banyak yang disalah gunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya yaitu dengan memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai tempat untuk berdagang. Peristiwa tersebut banyak terjadi di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan merupakan hasil pemekaran Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan mulai menjadi kota mandiri sejak tahun 2008. Dalam pembentukan wilayah ini Kota Tangerang Selatan dinobatkan sebagai kota yang otonom. Populasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan terbilang cukup padat penduduknya, tercatat dalam katalog BPS 2020, pada tahun 2019 terdapat 1.747.906 penduduk yang menempati Kota Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan (Tangsel), sebagai kawasan penyangga Jakarta yang mengalami pertumbuhan urbanisasi cepat, masalah penataan PKL semakin mendesak. Menurut laporan Dinas Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Selatan tahun 2021, terdapat sekitar 5.000-6.000 PKL yang beroperasi di wilayah ini, dengan konsentrasi utama di kawasan seperti Alam Sutera, BSD City, dan sekitar stasiun kereta api. Sayangnya, hanya sekitar 30% PKL yang telah terintegrasi dalam program relokasi resmi, sementara sisanya masih berjualan secara liar di trotoar, pinggir jalan, dan ruang publik. Pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi, dengan jumlah PKL melonjak hingga 15% karena banyak pekerja formal

kehilangan pekerjaan, sesuai data BPS Provinsi Banten tahun 2020-2021. Program penataan pemerintah daerah, seperti "PKL Teratur" pada 2019-2022, masih menghadapi tantangan, termasuk resistensi dari PKL dan kurangnya koordinasi antar-stakeholder, yang menyebabkan kegagalan relokasi di beberapa lokasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima menjelaskan bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata, dan diberdayakan sehingga terwujud suatu lingkungan yang aman, tertib, sehat, bersih dan indah. Berdasarkan peraturan tersebut sudah seharusnya pemerintah sudah menjalankan tugasnya, akan tetapi pada kenyataan di lapangannya hanya beberapa tempat yang berhasil dilakukan relokasi dan penataan. Saat ini masih ada wilayah yang belum dilakukan relokasi secara menyeluruh salah satunya Adalah Pamulang. Pamulang adalah kecamatan di Tangerang Selatan dengan luas wilayah 2.682 Ha (Revisi RTRW Kota Tangerang Selatan, 2011-2031). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, jumlah penduduk Pamulang diperkirakan sekitar 324.059 jiwa pada pertengahan tahun 2023 dan 339.054 jiwa pada semester pertama tahun 2025. Angka ini menjadikan Pamulang sebagai kecamatan dengan penduduk terpadat di Tangerang Selatan. Hal ini lah yang menjadikan urgensi terhadap penataan, dikarenakan padatnya penduduk di Pamulang menyebabkan banyak dan maraknya pedagang kaki lima, terkhususnya di Jalan Surya Kencana yang

merupakan jalan penghubung antara Tangerang Selatan (Tangsel) dengan Depok sehingga memiliki fungsi strategis sebagai jalur penghubung antar wilayah.

Maraknya Pedagang Kaki Lima di jalan ini di dukung dengan kondisi dan luas jalan yang sempit sehingga kemacetan tak terhindarkan di Lokasi ini. Walaupun dengan kondisi tersebut hingga saat ini belum terlihat peran pemerintah setempat untuk melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Berdasarkan Perda No 8 tahun 2014 Tangerang Selatan dijelaskan bahwa apabila Lokasi tempat PKL berjualan adalah Lokasi binaan sementara, maka seharusnya dilengkapi dengan papan nama Lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan Batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1.1 Kondisi Jalan Surya Kencana
Sumber: Data Primer Peneliti (2025)

Dilihat dari Gambar 1.1 diatas bahwa dengan kondisi lebar Jalan Surya Kencana yang hanya 2 ruas jalan, dengan kondisi banyaknya *stand*

Pedagang Kaki Lima (PKL) dikiri dan kananannya, maka tak jarang membuat area sepanjang jalan tersebut terjadi macet di jam-jam tertentu seperti jam pagi berangkat kerja, Siang ketika istirahat dan juga sore hingga malam.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan (2023), tingkat kemacetan di Jl. Surya Kencana meningkat hingga 30% pada jam sibuk akibat aktivitas PKL yang menggunakan trotoar dan sebagian badan jalan untuk berjualan. Fenomena kemacetan akibat PKL di Jalan Surya Kencana mencerminkan masalah penataan ruang publik yang lebih luas di kawasan suburban Indonesia. Secara umum, PKL menyumbang sekitar 20% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor informal nasional, dengan lebih dari 1,5 juta pedagang di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS, 2022). Ketidakteraturan mereka sering kali memicu dampak negatif, seperti peningkatan sampah hingga 15-20% di area perdagangan kaki lima (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021) dan konflik sosial antar-stakeholders, termasuk pemerintah daerah, pedagang, dan masyarakat sekitar. Di Tangerang Selatan, pertumbuhan penduduk sebesar 4,5% per tahun (BPS Provinsi Banten, 2023) semakin memperburuk tekanan pada infrastruktur jalan, di mana upaya relokasi PKL oleh pemerintah sering gagal karena kurangnya partisipasi stakeholders.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Tangerang Selatan khususnya di Jalan Surya Kencana Pamulang, memerlukan upaya penataan PKL di kawasan ini. Akan tetapi penataan tersebut belum sepenuhnya terjadi karena sejak tahun 2022 penataan Pedagang Kaki Lima di Pamulang

baru terselenggarakan sebanyak 1 kali dengan jumlah 15 Pedagang Kaki Lima yang berhasil di tertibkan (Satu Data Tangsel, 2022).

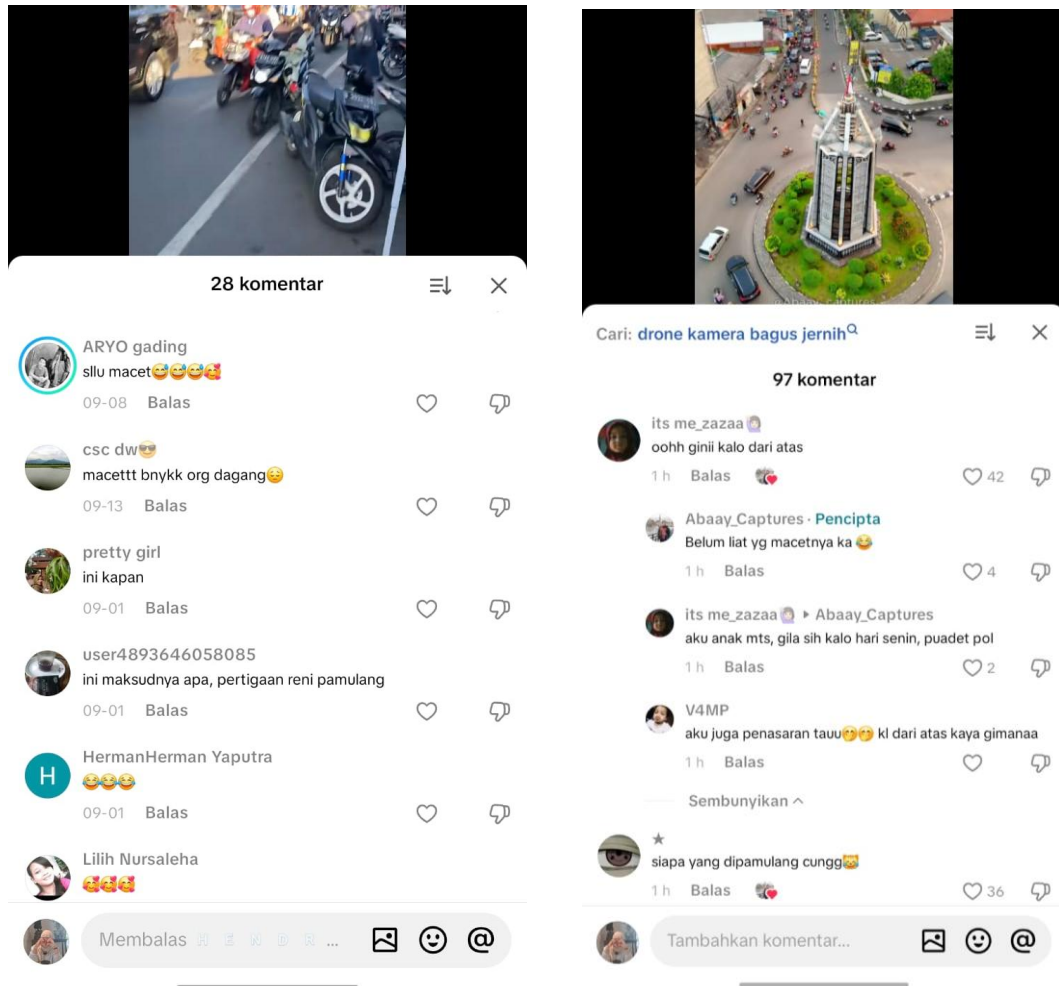
Dalam penataan PKL di Jalan Surya Kencana ini, Adapun diantaranya beberapa stakeholder yang dinilai belum berjalan optimal. *Pertama*, Pemerintahan Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki peran utama dalam menyusun kebijakan dan regulasi penataan PKL. Namun, pelaksanaannya belum efektif. Berdasarkan data Satu Data Tangsel (2022), kegiatan penertiban PKL di Pamulang hanya dilakukan satu kali selama tahun 2022, dengan hanya 15 PKL yang berhasil ditertibkan. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas keberlanjutan program penataan.

Kedua, Satpol PP sebagai implementer atau pelaksana lapangan. Satpol PP memiliki tanggung jawab langsung dalam penegakan aturan. Namun, banyak laporan masyarakat menyebutkan bahwa penertiban sering kali tidak berkelanjutan dan tidak disertai pembinaan. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait penertiban PKL di Jalan Surya Kencana ini menyebutkan bahwa :

“Pedagang disini banyak banget full sering macet. Waktu itu pernah ada penertiban tapi udah lama ngga ada lagi, sekarang macet apalagi kalo bulan puasa” – Warga sekitar Jalan Surya Kencana

Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran Satpol PP sebagai implementer yang seharusnya menjaga keberlanjutan kebijakan. Selain itu banyak

masyarakat yang mengeluhkan kemacetan yang terjadi di Jalan Surya Kencana ini.



Gambar 1.2 Komentar Masyarakat sekitar terkait kondisi di Jalan Surya Kencana Pamulang
Sumber: Tiktok (2025)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas bahwa dapat diketahui keresahan warga terkait kemacetan di Jalan Surya Kencana ini menarik perhatian dan dibutuhkan tindaklanjut oleh stakeholders terkait. Peran pemangku kepentingan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Permasalahn yang telah dijelaskan diatas

terjadi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya peran salah satu *stakeholder* saja. Oleh karena itu, permasalahan penataan PKL ini perlu dilakukan pemetaan stakeholder siapa saja yang terlibat dalam penataan PKL di Jalan Surya Kencana ini serta menganalisis faktor – faktor penghambat dan pendukungnya proses penataan tersebut. *Stakeholders* adalah pihak yang memberikan pengaruh dan mendapatkan sebuah pengaruh terhadap suatu keputusan yang terjadi. *Stakeholders* juga dapat diartikan sebagai masyarakat maupun individu yang mempunyai kekuasaan, validitas, serta kepentingan terhadap suatu hal (Chandra et al., 2011). Secara sederhana *stakeholders* dapat diartikan pihak yang dipengaruhi dan/atau mempengaruhi terhadap sebuah keputusan yang ada.

Secara konseptual, penataan PKL tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai aktor tunggal, namun memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Dalam konteks penataan PKL di Jalan Surya Kencana Pamulang, pemangku kepentingan yang terlibat meliputi pemerintah daerah (Dinkop UKM, Satpol PP, kecamatan, dan kelurahan), PKL sebagai kelompok sasaran, masyarakat sebagai pengguna ruang publik, hingga pihak swasta sebagai unsur pendukung kawasan ekonomi. Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi penting karena penyelenggaraan PKL adalah persoalan ruang publik yang bersinggungan langsung dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan kenyamanan pengguna jalan. Dengan demikian, peran pemangku kepentingan menentukan efektivitas

implementasi kebijakan, mulai dari penyusunan kebijakan, koordinasi antar pihak, fasilitasi relokasi, hingga pengawasan dan percepatan keberhasilan penataan program.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran *stakeholder* yang terlibat dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Surya Kencana serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam proses penataan Pedagang Kaki Lima di daerah tersebut, padahal jika dilihat urgensi dan permasalahan yang terjadi sudah berkepanjangan dan menimbulkan keresahan masyarakat selaku pengguna jalan tersebut. Penelitian ini menarik untuk dikaji karena fenomena maraknya pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Surya Kencana, Pamulang, tidak hanya mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan konflik yang kompleks antara pemerintah dan pedagang. Kemacetan yang terjadi akibat keberadaan PKL dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan menimbulkan ketidaknyamanan di ruang publik. Dengan menggunakan teori peran *stakeholders* oleh Nugroho (2014) teori ini mengklasifikasikan para pemangku kepentingan berdasarkan peran spesifik mereka dalam sebuah program atau kebijakan, terutama dalam konteks pembangunan. Hal ini penting karena pengelolaan yang efektif dapat menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak, serta mendukung terciptanya lingkungan kota yang lebih tertata.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dikaji adalah dalam penelitian ini terletak pada kekurangan studi yang secara spesifik

menganalisis penyelesaian PKL di Jl. Surya Kencana, Pamulang. Sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Yovi Hayuning Nitria pada tahun 2022 dengan judul “*Analisis Stakeholders Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo Kota*” yang lebih fokus pada aspek pengelompokan *stakeholder* dalam penertiban PKL tanpa menggali secara mendalam tentang faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini akan menambahkan perspektif baru dengan mengkaji interaksi antara pemerintah dan PKL serta memberikan rekomendasi strategi yang lebih efektif berdasarkan temuan lapangan. Pemilihan Tangerang Selatan, khususnya di Jalan Surya Kencana, juga mempertimbangkan karakteristik unik wilayah ini yang memiliki tingkat kepadatan PKL yang tinggi dan belum berjalannya penataan pedagang kaki lima (PKL) secara efektif. Kondisi ini memberikan konteks empiris yang spesifik, berbeda dengan kondisi di kota lain yang mungkin memiliki kebijakan lebih efektif atau karakteristik masalah berbeda. Hal ini penting untuk memberikan solusi yang kontekstual dan terarah.

Dengan memahami hubungan dan peran pemangku kepentingan, untuk menciptakan daerah dan lingkungan yang tertib, aman dan rapi. Memerlukan peran dari pemerintah, organisasi terkait, PKL, dan masyarakat agar dapat mewujudkan lingkungan tersebut. Pemerintah yang berperan sebagai pembuat kebijakan serta pengawas terkait keberjalanan kebijakan tersebut. PKL yang berperan sebagai pihak yang berdagang dan masyarakat yang berperan sebagai pengguna ruang publik.

Dalam hal tersebut menimbulkan pertanyaan Bagaimana pelaksanaan Penataan PKL di Jalan Surya Kencana belum berjalan? Di Tengah permasalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Surya Kencana ini. Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai “Peran *Stakeholder* dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Surya Kencana Pamulang”. Sehingga hasil penelitian ini relevan untuk digunakan sebagai referensi terhadap rekomendasi terkait permasalahan yang timbul akibat penataan PKL di Jalan Surya Kencana Pamulang dan menciptakan keteraturan ruang publik tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi informal di Tangerang Selatan.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana yang berjualan di bahu jalan yang menyebabkan penyempitan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
2. Penataan PKL yang masih sporadis dan belum menyeluruh menyebabkan ketidakmerataan, sehingga sebagian PKL tetap beroperasi secara liar di ruang publik.
3. Peran beberapa pemangku kepentingan dalam penataan PKL belum berjalan optimal dan kurang efektif.

4. Penertiban PKL yang dilakukan kurang berkelanjutan, sehingga menyebabkan masalah kemacetan.
5. Koordinasi dan partisipasi antar pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan PKL kurang maksimal, sehingga menimbulkan ketidakteraturan dalam penataan PKL.
6. Penataan PKL di Jalan Surya Kencana belum berjalan efektif meskipun sudah ada regulasi dan kebijakan yang mendukung, mengingat semakin banyak PKL yang tetap berjualan di sepanjang Jalan Surya Kencana.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *stakeholder* dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Surya Kencana Pamulang?
2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis peran *stakeholders* dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen konflik dan tata ruang. Dengan menyelesaikan manajemen konflik dalam penyelesaian pedagang kaki lima (PKL) di Jl. Surya Kencana, Pamulang, penelitian ini memperkaya literatur yang ada mengenai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks pengelolaan ruang publik. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen konflik di kawasan perkotaan lainnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menggunakan hasil dari proses pembelajaran peneliti selama masa perkuliahan, sehingga peneliti dapat menerapkan materi dan ilmu yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melaksanakan dan melakukan penelitian.

2. Bagi Instansi Terdekat

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penataan PKL. Dengan memahami peran *stakeholder* pemerintah dapat

mengembangkan strategi pengelolaan konflik yang lebih baik, seperti meningkatkan dialog antara pemerintah dan PKL serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dan meningkatkan kualitas ruang publik di Jl. Surya Kencana.

1.4.3 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan wawasan masyarakat. Serta Memperluas pemahaman tentang dinamika interaksi dan peran strategi berbagai pemangku kepentingan dalam konteks pengaturan pedagang kaki lima, termasuk bagaimana konflik dan kolaborasi dapat dikelola secara efektif. Dan Menjadi kerangka acuan dalam mengembangkan model pengelolaan partisipatif yang mengakomodasi kepentingan pedagang, pemerintah, dan masyarakat, sehingga hasil pengelolaan ruang publik lebih berkelanjutan dan sosial-ekonomi yang adil.

1.5 Kerangka Penelitian Terdahulu

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Urgensi penelitian penelitian ini untuk mencegah adanya plagiarisme melalui pemetaan penelitian. Pemetaan ini bertujuan untuk menentukan penelitian yang sedang dilakukan apakah lebih unggul, sederhana, atau imbang dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian pengelompokan pemetaan ini membantu peneliti untuk menilai sejauh mana penelitian yang akan dilakukan dapat berkembang atau tidak jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang sejenis.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Pnelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Peneliti : Yovi Hayuning Nitria Judul: Analisis Stakeholders Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridanggo Kota	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam penataan PKL Kridanggo serta menganalisis peran yang dimiliki oleh setiap <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam	Teori : Peran Stakeholder menurut Nugroho dalam Setiawan & Nurcahyanto, 2020 Klasifikasi Stakeholder	Temuan studi ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perdagangan Kota Salatiga adalah sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai pelaksana atau penjamin peraturan daerah. Satpol PP berperan sebagai koordinator Dinas Perdagangan	Perbedaan terletak pada judul penelitian, masalah penelitian, beserta teori yang digunakan.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Tahun : 2022 (Nitria et al., 2022)	penataan PKL Kridanggo.	menurut Maryono (dalam Yosevita,2015) Tipe Penelitian: Deskriptif Kualitatif	dan pedagang kaki lima, sekaligus fasilitator dan akselerator, yang mengembangkan pendekatan bagi pedagang kaki lima. Sementara itu, pedagang kaki lima Kridanggo berperan sebagai akselerator, yang memfasilitasi proses restrukturisasi.	
Peneliti: Muhammad Zaki Zaidan, Fitriyah Judul Artikel: Penertiban Pedagang Kaki Lima di Ruas Jalan Pasar Serpong Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan	Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Serpong, Kota Tangerang Selatan, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam	Model Pendekatan : Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan temuan tersebut, pengaturan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Perda) No. 8 Tahun 2014, yang lebih mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi dibandingkan Perda sebelumnya. Implementasi kebijakan ini terhambat oleh kurangnya peraturan serikat pekerja yang merinci detail teknis peraturan tersebut, kurangnya area penjualan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada <i>stakeholder</i> yang diamati, dimana penelitian ini hanya berfokus pada Satpol PP.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Tahun: 2025 (Muhammad Zaki Zaidan*), n.d.)	proses penertiban tersebut.		khusus, dan kurangnya peraturan tata kota. Serta koordinasi antar-OPD terkait. Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera menerbitkan Peraturan Wali Kota untuk mengatur penetapan kawasan komersial, meningkatkan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah (OPD), dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pedagang kaki lima (PKL).	
Peneliti : Muhammad Nuril Muril Mubin Judul : Sinergitas <i>Stakeholders</i> dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang peran <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam upaya penataan PKL di Kabupaten Jombang. Serta bagaimana sinergitas stakeholders	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif Teori : Sinergitas oleh Doctoroff	Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat banyak pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Kesehatan di Kantor Wilayah Jombang (Satpol PP). Kementerian Perdagangan	Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian, Dimana penelitian ini menjelaskan tentang sinergitas para <i>stakeholders</i> .

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Kabupaten Jombang Tahun : 2019 (Mubin, n.d.)	dalam penataan PKL di Kabupaten Jombang dengan menggunakan Analisa dari indicator sinergi menurut Doctoroff yang meliputi kepercayaan, komunikasi yang efektif, umpan balik dan kreatifitas.		berperan memimpin tim koordinasi dan tim teknis Tim ini berfungsi sebagai forum komunikasi antar pemangku kepentingan. Dinas Lingkungan Hidup berperan menyediakan ruang komersial bagi pedagang kaki lima di alun-alun dan Taman Kebonrojo, sementara Dinas Pemuda dan Olahraga mengelola area Stadion Merdeka. Dinas Perdagangan melaksanakan tugas-tugas pembangunan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab atas penegakan hukum. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan sinergis antar pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini disebabkan oleh dua indikator sinergi komunikasi yang efektif dan umpan balik yang tidak tercapai. Sementara itu, bukti kepercayaan dan kreativitas yang muncul belum mampu	

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			mendukung hubungan kolaboratif dengan para pemangku kepentingan dalam mengorganisir pedagang kaki lima di Kabupaten Jombang.	
Peneliti : Saskia Jasmine Zuha Saphira Sulaiman Judul: Konflik Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Masyarakat Dalam Kebijakan Penataan PKL Tahun : 2019 (Sulaiman, 2019)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk konflik yang terjadi dan upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahannya.	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif Metode Analisis : Analisis Interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana	Hasil temuan menunjukkan bahwa jenis konflik yang timbul di kalangan pedagang kaki lima di Desa Taman Pinang tidak hanya berupa demonstrasi, blokade jalan, dan penyerangan terhadap aparat, tetapi juga konflik laten seperti persaingan dan kurangnya rasa persatuan di kalangan pedagang itu sendiri, yang menolak pindah ke lokasi lain karena menganggap permukiman tersebut sebagai tempat usaha yang diminati. Mereka merasa hak-hak penghidupannya tidak mendapat perhatian yang cukup dan menganggap keberadaan mereka di kawasan Taman Pinang tidak mengganggu pergerakan dan aktivitas warga	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada permasalahannya, tujuan, dan metode analisisnya.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			maupun pejalan kaki yang melintas di kawasan tersebut.	
Peneliti : Andi Wicaksono Judul : Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Ngadiharjo di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Tahun: 2022 (Wicaksono, 2022)	Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata Ngadiharjo	Jenis Penelitian : Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa peran stakeholder dalam pengembangan desa wisata Ngadiharjo dapat diklasifikasikan menjadi pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Pembuat kebijakan dalam penelitian ini adalah Kementerian BUMN dan pemerintah desa yang berperan dalam perencanaan, membuat kebijakan, dan membuat peraturan. Koordinator dilaksanakan oleh BUMDes dan PT. PLN yang berperan dalam mengkoordinasikan pemerintah dengan masyarakat. Disparpora, pemerintah desa dan PT. PLN merupakan fasilitator yang berperan memberikan motivasi, pendampingan, pelatihan, dan	Perbedaan penelitian ini adalah dalam lokus dan konteks penelitian, akan tetapi sama-sama membahas terkait peran <i>stakeholders</i> .

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			membina masyarakat. Implementor yaitu BUMDes dan masyarakat melalui organisasi dan mengikuti pelatihan. Dan akselerator dalam penelitian ini adalah agen travel online dimana teknologi saat ini memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata Ngadiharjo. Peran stakeholder saling berkaitan dalam mengisi ruang kolaborasi untuk mencapai tujuan pengembangan desa wisata.	
Peneliti : Firman Saputra Napitupulu, Ari Subowo, Teuku Afrizal Judul: Peran Stakeholders dalam pengentasan Kemiskinan Kelompok	Penelitian ini bertujuan untuk meneliti jaringan <i>stakeholders</i> dan peran dari setiap <i>stakeholders</i> dalam program pengetasan kemiskinan. Berbasis metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data.	Hasil menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang berperan penting dalam menyediakan data kemiskinan bagi kota. Data ini menjadi dasar bagi program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Dinas ini bekerja sama dengan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada judul, dan lokus.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Nelayan di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Tahun : 2019 (Firman Saputra Napitupulu & Afrizal, 2019)	adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.		Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan Tanjung Mas, yang merupakan kontributor utama dalam pendataan kemiskinan. Kelompok kepentingan sekunder meliputi asosiasi nelayan tradisional Indonesia (KPI), kelompok usaha patungan (Koperasi Usaha Bersama), dan warga setempat (RT), yang juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan program pemerintah dan mendukung desa nelayan. Di sisi lain, kelompok kepentingan tersier adalah masyarakat lokal yang mendapatkan manfaat dari dan melaksanakan kebijakan. Studi ini menyatakan bahwa terdapat empat jaringan kelompok kepentingan, masing-masing dengan peran yang berbeda. Saran yang dapat diberikan perlu adanya peningkatan koordinasi dalam jaringan <i>Stakeholders</i> yang ada dan	

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			Dinas Sosial juga diharapkan tidak hanya sebagai penyedia data tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi program pengentasan kemiskinan.	
Peneliti : Ade Silva Cendrakasih Judul : Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasar Inpres Kecamatan Simeuleu Timur oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simeuleu Tahun : 2022 (Cendrakasih, 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Simeuleu dalam menangani Pedagang Kaki Lima dan juga mengetahui bagaimana penataan yang dilakukan Satpol PP Kecamatan Simeuleu Timur dalam menangani Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif Model Penelitian : Penelitian Lapangan (Field Research)	Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima sudah cukup operasional, akan tetapi dalam kegiatan keamanan dan ketertiban pasar pajak inpres belum cukup baik dan diperlukannya pengawasan keamanan dan ketertiban secara langsung oleh pihak pasar serta partisipasi PKL dan masyarakat.	Perbedaan pada penelitian ini adalah berbeda pada judul, Lokasi dan juga tujuan penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Peneliti : Anisa Rahmawati, Aufarol Marom Judul : Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Objek Wisata Serulingmas Interactive Zoo, Kabupaten Banjarnegara Tahun: 2022 (Anisa Rahmawati, n.d.)	Melalui penelitian ini diharapkan dapat dilakukan analisis mengenai sejauh mana kontribusi dan efektivitas pemangku kepentingan dalam pengembangan daya tarik wisata sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara 2015-2030.	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif dengan dengan purposive sampling dan snowball sampling untuk memilih informan. Model Penelitian: menggunakan teori klasifikasi <i>stakeholder</i>, dan penelusuran relasi <i>stakeholder</i> (Reed dkk., 2009)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan aspek pemasaran, industri, dan kelembagaan sudah sangat baik, namun pengembangan daya tarik wisata belum optimal, terutama disebabkan oleh kurangnya dana untuk pengembangan prasarana dan sarana. Stakeholder kunci, Perumda TRMS Serulingmas, juga telah bermitra dengan baik dengan pemerintah, peneliti, warga sekitar, LSM, media, dan wisatawan. Namun, hingga saat ini, belum ada keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan Kebun Binatang Interaktif Serulingmas, yang menunjukkan perlunya rencana jaringan kemitraan dengan pihak swasta. Selain itu, isu-isu seperti masalah komunikasi, pergeseran nilai dan prinsip manajemen, kepercayaan, dan peraturan yang kompleks telah	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada, lokus, judul, dan permasalahan.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			ditemui dalam proses pengembangan, yang menyebabkan kendala dalam keterlibatan modal. Diperlukan strategi baru dari para pemangku kepentingan untuk mempercepat target pengembangan Kebun Binatang Interaktif Serulingmas, terutama dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Komunikasi harus dibangun sebagai kunci untuk mengoptimalkan jaringan kerja sama antar pemangku kepentingan.	
Peneliti: Hernanada Wahyu Purnama, Fauzul Rizal Sutikno, Nailah Firdausiyah Judul: Peran Stakeholder dalam Pengelolaan	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana peran <i>stakeholder</i> terkait yang terkoneksi dengan pengelolaan kegiatan informal pada koridor Jalan Sukarno Hatta	Model Penelitian : Analisis <i>stakeholders</i> dan <i>social network analysis</i> Jenis Penelitian :	Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat instansi yang mengalami miskomunikasi dalam kolaborasinya dan belum menjalankan sepenuhnya atas tugas dan fungsinya dalam mengelola kegiatan informal. Sebagai penutup studi ini, diberikan rekomendasi mengenai pengelolaan kegiatan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada judul, tujuan, dan model penelitiannya.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Kegiatan Informal di Jalan Sukarno Hatta Kota Malang Tahun: 2025 (Purnama et al., 2025)	serta interaksi di antara mereka.	Deskriptif Kualitatif	informal, khususnya pedagang kaki lima, berdasarkan studi kasus di Soi Rangnam, Bangkok, Thailand, dimana pemerintah telah secara efektif merangkul informalitas dan mengubahnya menjadi usaha yang menguntungkan.	
Peneliti : Rico Herzog, Juliana E. Goncalves, Geertje Slingerland Reinout Kleinhans, Holger Prang, Frances Brazier ¹ and Trivik Verma Judul: Identifying public values and spatial conflicts in urban planning	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik terhadap nilai publik di ruang kota secara empiris, serta mengusulkan alat konseptual ruang nilai publik.	Jenis Penelitian : mix methode kuantitatif dan Kualitatif	Dari penelitian tersebut diidentifikasi bahwa ada 19 nilai publik umum dan 9 konflik arketipe dalam ruang kota.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada judul, tujuan, dan fokus permasalahannya.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Tahun: 2022 (Herzog et al., 2022)				
Peneliti : Muhammad Rizky Siregar, M. Ridwan Judul: Efektivitas Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Medan Tahun: 2022 (Rizky Siregar & Ridwan, 2022)	Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas Dinas Perdagangan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima	Model Penelitian: Kualitatif Deskriptif	Hasil studi ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi tanggung jawabnya dalam mempromosikan pedagang kaki lima secara efektif dan kompeten. Pemerintah juga telah memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola kios-kios penjualan secara efektif dan kompeten. Desain kios-kios penjualan saat ini mencakup opsi penyewaan kios, yang membuat lanskap kota lebih rapi, bersih, dan menarik.	Perbedaan penelitian yang didapatkan adalah fokus pembahsan, judul, dan juga tujuan serta fenomena permasalahannya.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Peneliti : C.L. Szostek a, S.C.L. Watson , N. Trifonova b , N.J. Beaumont, B.E. Scott. Judul : <i>Spatial conflict in offshore wind farms: Challenges and solutions for the commercial fishing industry</i> Tahun: 2025 (Szostek et al., 2025)	Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mendukung peningkatan kalaborasi dan kesetaraan antara nelayan komersial dan Perusahaan energi dalam melakukan penyewaan pada pantai lepas di masa mendatang, dengan cara menguraikan konflik dan faktor-faktor pendukungnya.	Jenis Penelitian : Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah telah ditemukan bahwa masalah yang sama yang diangkat oleh industri perikanan komersial 20 tahun lalu, dan dengan perluasan energi global, dll. Dan untuk mempromosikan transisi energi yang terbarukan yang adil dan mencakup pertimbangan sektor kelautan lainnya, dengan membuat rekomendasi kebijakan.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus permasalahannya, judul, dan model penelitiannya.
Peneliti : Dirk. P Cillers Judul : Considering flood risk in spatial	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan manajemen risiko banjir ke dalam perencanaan tata guna lahan dengan	Jenis Penelitian : Deskriptif dengan pendekatan Analisis kesesuaian lahan dan	Hasil dari Penelitian ini adalah Hanya 8% dari total wilayah studi yang cocok untuk permukiman tanpa risiko banjir. Sekitar 44% wilayah perlu dilindungi untuk konservasi keanekaragaman hayati. Kurang dari 2% wilayah mengalami	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak dari tujuan, judul, dan permasalahannya.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
development planning: A land use conflict analysis approach. Tahun : 2019 (Cilliers, 2018)	menggunakan pendekatan analisis konflik penggunaan lahan (LUCIS).	analisis konflik penggunaan lahan	konflik dalam penggunaan lahan (misalnya, area yang cocok untuk permukiman tetapi juga untuk pertanian atau konservasi). Beberapa daerah yang direncanakan untuk pengembangan dalam rencana tata ruang saat ini sebenarnya berada di zona rawan banjir. HAND terbukti sebagai metode yang efektif untuk mengidentifikasi wilayah rawan banjir di daerah yang memiliki keterbatasan data hidrologi.	
Peneliti : Qinggang He, Haiseng Cai, Liting Chen Judul : Concept and Method of Land Use Conflict Identification and	Penelitian ini melakukan penelitian tentang konflik penggunaan lahan dan pengendalian zonasi dengan tujuan untuk memberikan kontribusi ide-ide baru untuk pencegahan dan penyelesaian risiko penggunaan lahan.	Jenis Penelitian : evaluasi komprehensif dan detektor geografis,	Hasil studi empiris menunjukkan bahwa wilayah konflik intens, konflik rendah, dan konflik lemah masing-masing mencakup 1,57%, 29,16%, dan 69,26% dari luas DAS. Dari wilayah konflik intens, 4,42% wilayah di DAS. Bagian bawah mengalami konflik intens, sementara hanya 0,37% wilayah tepi kanan DAS	Perbedaan dengan penelitian ini adalah perbedaan tujuan, lokus, dan permasalahan

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Territorial Spatial Zoning Control Tahun : 2024 (He & Cai, 2024)	Dengan menganalisis posisi dan memanfaatkan teori-teori fundamental, paradigma penelitian baru diusulkan.		bagian tengah mengalami konflik intens. Analisis faktor pendorong menunjukkan bahwa curah hujan, kepadatan penduduk, dan perencanaan kebijakan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap konflik penggunaan lahan dan bahwa konflik penggunaan lahan lebih mungkin terjadi dengan interaksi curah hujan dan indeks cahaya malam, kepadatan penduduk, dan NDVI. Analisis citra superimposed mengungkapkan bahwa konflik penggunaan lahan sangat intens di persimpangan wilayah perkotaan dan lahan pertanian dan di persimpangan lahan pertanian dan hutan di bagian tengah dan hulu DAS, yang terutama disebabkan oleh permintaan perluasan perkotaan dan penyebaran wilayah produksi pertanian. Hasil studi empiris ini sesuai dengan situasi	

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
			aktual di DAS Gan, membuktikan bahwa paradigma penelitian yang diusulkan dalam studi ini ilmiah dan dapat diterapkan. Selain itu, kami menekankan bahwa paradigma ini dapat disesuaikan dalam penerapannya menurut berbagai objek penelitian dan terus ditingkatkan sebagai respons terhadap evolusi sistem pengelolaan tata ruang teritorial. Studi ini memiliki signifikansi positif bagi implementasi perencanaan tata ruang teritorial dan memberikan dasar ilmiah untuk peningkatan lebih lanjut sistem tata kelola tata ruang teritorial.	
Peneliti : Maasago Mercy Sepadi and Lebogang Cleopatra Phama	1. Meningkatkan kesiapsiagaan darurat pedagang kaki lima dengan memahami potensi keadaan darurat, mengidentifikasi	Tipe Penelitian : Kualitatif Pendekatan Penelitian: pendekatan sistematis dan	1. Menyoroti pentingnya regulasi standar kesehatan dan keselamatan di sektor perdagangan luar negeri untuk mengurangi risiko dan potensi konflik.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada judul penelitian, masalah, tujuan, serta Teknik analisis yang digunakan penelitian.

Nama Pengarang, Judul Artikel, Tahun Penerbitan	Tujuan Penelitian	Teori/ Model yang dipakai, Tipe Penelitian, Teknik analisis	Hasil / Temuan	Perbedaan dengan Penelitian ini
Judul Artikel : Street Trading Uncovered: A Comprehensive Evaluation of Occupational Risk and Management Strategies in the South African Urban Marketplace Tahun : 2024 (Sepadi & Phama, 2024)	kerentanan lokasi perdagangan, serta menilai risiko dan bahaya yang terkait. 2. Mengevaluasi secara sistematis risiko yang dihadapi pedagang kaki lima guna mengembangkan strategi mitigasi yang efektif.	ilmiah dalam penilaian dan manajemen risiko	2. Menyampaikan strategi komunikasi dan kesiapsiagaan darurat guna membantu pedagang mengatasi tantangan serta mengurangi konflik dengan orang lain	

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Mengacu pada tabel 1.2, yang berisi matriks penelitian sebelumnya, bahwa dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara penelitian ini dengan studi yang telah dilakukan sebelumnya. Lokasi yang digunakan oleh peneliti sebelumnya tidak ada yang serupa, Namun untuk perbedaan lainnya dapat dilihat bahwa pertama, ketika dilihat dari masalah dan tujuan penelitian. Meskipun tema yang dibahas serupa, yaitu mengenai Peran Stakeholders dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi Lokasi yang ditargetkan berbeda,

sehingga memengaruhi isu dan sasaran studi. Karena setiap daerah memiliki masalah yang berbeda, dan juga peneliti melihat dari perspektif yang berbeda, sehingga sasaran penelitian setiap peneliti dari peneliti pertama hingga kelima belas pun berbeda. Perbedaan yang kedua adalah terletak pada teori yang digunakan. Walaupun serupa akan tetapi teori yang digunakan rata-rata berbeda. Peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan oleh George Edward III dan Peran Stakeholders oleh Freeman.

Secara keseluruhan adanya penelitian terdahulu yang ditulis peneliti sangat membantu peneliti dalam meningkatkan kualitas penelitian peneliti dengan cara memperkuat landasan teori, memperdalam metodologi penelitian dan mempertajam fokus penelitian peneliti, serta juga meningkatkan validitas dan reliabilitas dalam hasil penelitian. Penelitian memiliki kelebihan lebih terbaru dari penelitian sebelumnya karena peneliti mengangkat isu dan permasalahan yang belum pernah dikaji sebelumnya di Pamulang, terutama di Pamulang Barat. Hal ini menjadikan bukti bahwa penelitian peneliti memiliki potensi memberikan kontribusi baru yang signifikan terhadap pemahaman mengenai peran stakeholder yang sesuai dalam pemerintahan.

1.5.2 Kajian Teori

1.5.2.1 Administrasi Publik

Kata administrasi publik adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*public administration*” yang sering disebut sebagai administrasi negara atau administrasi pemerintahan, (Indradi, 2016). Menurut Chandler (1998) dalam (Indradi, 2016) dijelaskan bahwa Administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan personel publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan keputusan kebijakan publik. Administrasi publik mengacu pada serangkaian kegiatan yang mencakup perumusan, perencanaan, penyusunan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan, dan pengawasan kebijakan. (Hardiansyah, 2012:12). Administrasi merupakan tugas yang dilakukan orang ataupun sekelompok orang melalui kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (2013:3). Sedangkan publik adalah sekumpulan manusia yang mempunyai kesamaan berpikir serta keputusan yang benar berdasarkan nilai yang dimiliki (Syafiie, 2010:17). Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu organisasi (Mukarom, 2015:17). Administrasi publik adalah ilmu perencanaan pemerintahan yang baik (Thoha, 2008:94). Administrasi publik adalah koordinasi perencanaan dan implementasi kebijakan untuk meningkatkan kepentingan publik dan mencapai tujuan nasional (Wirman, 2012:25). Lebih lanjut, menurut Ibrahim (2009:17), birokrasi diorganisasikan melalui manajemen pemerintahan dengan metode kerja dan dukungan sumber daya manusia. Dwight Waldo (dalam Syafiie, 2010:25) menggambarkannya sebagai manajemen suatu

organisasi untuk mencapai tujuan nasional. Administrasi publik adalah kolaborasi dalam organisasi publik, termasuk lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif. (Nigro dan Nigro dalam Anggara, 2016:46), Sedangkan (Pasolong, 2019) Administrasi publik digambarkan sebagai kerja sama dalam melaksanakan fungsi pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat dinyatakan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga-lembaga pemerintahan dan birokrasi, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, untuk mencapai tujuan negara secara efektif dan efisien. Administrasi publik juga merupakan ilmu yang berkaitan dengan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu administrasi publik adalah suatu kegiatan pemerintahan yang meliputi pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan guna mencapai tujuan negara.

Hubungan antara administrasi publik dengan penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa administrasi ini mencakup berbagai hal yang kompleks. Maka dari itu keberadaan administrasi publik memudahkan dan dapat memberikan ketentraman, kesejahteraan serta ketertiban bagi masyarakat terkhusus di Pamulang Tangerang Selatan.

1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu pengetahuan yang dinamis dan telah mengalami perubahan dan pembaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Perubahan Paradigma ini terjadi berdasarkan tantangan dan masalah yang muncul. Walaupun selalu muncul perdebatan dalam sebuah paradigma, akan tetapi secara umum Nicholas Henry dalam (Keban, 2014) ada beberapa perkembangan paradigma administrasi publik. Diantaranya adalah:

a. Pradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Buku Frank J. Goodnow, *"Politics and Government"* (1900), mengidentifikasi dua fungsi utama negara: pertama, fungsi politik, yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan kehendak nasional, dan kedua, fungsi administratif, yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional. Ideologi ini menekankan keberadaan administrasi, yaitu "tempat". Administrasi itu sendiri harus dipisahkan dari politik.

b. Paradigma 2 : Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip administratif digunakan oleh pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya. Meskipun prinsip-prinsip administratif merupakan inti dari administrasi publik, cakupan penerapannya kurang ditekankan karena mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip administratif berlaku di mana saja, baik di sektor publik maupun swasta.

c. Paradigma 3 : Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1957)

Munculnya kritikan maupun pertentangan pada paradigma kedua menyebabkan administrasi publik kembali pada induknya yaitu Ilmu Politik. Paradigma ini sebagai sebuah usaha penetapan ulang konsep administrasi negara dengan ilmu politik.

d. Paradigma 4 : Administrasi Negara sebagai Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma ini bahwa administrasi adalah administrasi yang berdasarkan suatu premis terkait perbedaan publik, privat dan nonprovit merupakan suatu hal yang kurang tepat. Pada paradigma ini lebih membahas terkait tentang publik atau negara ataupun persoalan lainnya.

e. Paradigma 5 : Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970)

Pada paradigma ini administrasi publik mendapatkan pengpenulisan menjadu suatu ilmu yang berdisi sendiri. Munculnya paradigma ini diketahui dengan berdirinya The National Asociation of Schools Of Public Affairs and Administration (NSPAA) yang berfungsi untuk mengembangkan studi administrasi publik dan mendorong kepercayaan studi ini. Administrasi Publi sebagai suatu ilmu yang mempunyai fokus pada teori organisasi, ilmu manajemen, kebijakan publik dan keonomi politik.

f. Paradigma 6: Governance

Governance merupakan paradigma terbaru dalam administrasi publik, yang berarti suatu sistem atau nilai, kebijakan dan lemebagaan

termasuk dalam mengelola urusan yang berhubungan dengan politik, ekonomi, dan sosial. Pada paradigma *governance* ini dilakukan interaksi tiga elemen yaitu, masyarakat (*civil society*), pemerintah, dan bisnis (*private sector*). Pada paradigma ini memberikan ruang bagi partisipasi oleh sektor-sektor lain dalam pemerintahan, mengingat keterbatasan dalam sumber daya di pemerintahan sendiri. Sehingga pemerintah bukan menjadi aktor Tunggal dalam pengelolaan pemerintahan, akan tetapi masyarakat dan sektor swasta juga dapat ikut andil dalam memaknai kepentingannya.. paradigma ini menekankan penguatan interaksi antara ketiga actor tersebut dalam memperkenalkan *people-centered development*.

Paradigma Penelitian ini

Pada penelitian menggunakan paradigma keenam atau paradigma *governance*. Karena pada penelitian ini terdapat berbagai interaksi dari berbagai *stakeholders*, baik pada *stakeholders* pemerintah ataupun non pemerintah yaitu swasta, komunitas ataupun masyarakat. Paradigma penelitian ini paradigma *governance* sebab untuk menganalisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Jl. Surya Kencana Pamulang. Peran *stakeholders* sebagai integrasi hubungan antar *stakeholders* yang terlibat, baik pemerintah dengan komunitas, bisnis, ataupun masyarakat.

1.5.2.3 Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik memiliki berbagai arti yang berbeda diantaranya adalah William Dunn pada Pasolong (2011:39) mengungkapkan

tentang kebijakan publik merupakan sekumpulan pilihan yang berkaitan diambil oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada berbagai bidang yang berkaitan dengan tugas pemerintahan, seperti pertahanan dan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kriminalitas, perkotaan, dan lain sebagainya.

Menurut Thomas R. Dye dalam Pasolong (Pasolong, 2019), kebijakan publik menuliskan segala keputusan yang dipilih oleh pemerintah, baik untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2011:38) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pemanfaatan sumber daya secara strategis untuk menyelesaikan permasalahan publik atau pemerintahan. Sementara itu, Chaizi Nasucha dalam Pasolong (2011:39) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang diterapkan melalui perangkat hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk menangkap dinamika sosial di masyarakat, yang kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan guna menciptakan hubungan sosial yang harmonis.

Berdasarkan pengertian kebijakan publik dari beberapa ahli yang sudah disebutkan diatas, maka dapat dilihat bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan metode atau konsep atau cara yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Thomas R. Dye pada Nugroho (2012:120) menjelaskan kebijakan Publik mencakup segala hal yang dikerjakan maupun yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Ada beberapa konsep utama yang terkandung pada kebijakan publik, yaitu:

Kebijakan publik adalah tindakan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang hukum, politik, dan finansial untuk mengimplementasikannya. Kebijakan publik bertujuan memberikan solusi terhadap masalah atau kebutuhan di masyarakat. Kebijakan publik bukanlah sebuah keputusan individual, melainkan kumpulan tindakan atau strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik biasanya diterapkan sebagai langkah bersama untuk mengatasi masalah sosial, berupa keputusan apakah akan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan ini mencakup pernyataan atau alasan yang mendasari langkah-langkah atau rencana yang telah disusun oleh suatu lembaga pemerintah atau beberapa lembaga perwakilan pemerintah.

Setiap kebijakan publik yang dibuat pastinya memiliki tujuan tertentu, dan berdasarkan jenisnya, kebijakan publik memiliki beragam tujuan. Riant Nugroho (Riant, 2014) menjelaskan bahwa tujuan pembentukan kebijakan meliputi pengelolaan dan distribusi sumber daya, pengaturan atau pemberian kebebasan, mobilisasi sumber daya, pengendalian dinamika yang terlalu cepat, penguatan negara, serta penguatan pasar.

Pada dasarnya, ada tiga langkah utama dalam peraturan publik: (1) Merumuskan prosedur; (2) Melaksanakan prosedur; dan (3) Mengevaluasi prosedur. Pemilihan isu kebijakan yang ingin diselesaikan harus

dipertimbangkan dengan baik. Menurut Riant Nugroho (2012:185), isu kebijakan harus penting, melibatkan banyak orang atau berkaitan dengan kepentingan bersama, berdampak jangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh individu, dan harus menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan isu tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan, melaksanakannya, dan kemudian mengevaluasi apakah kebijakan itu berhasil menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan.

1.5.2.4 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah kajian yang berfokus pada pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaannya kebijakan sangatlah kompleks dan sering dipengaruhi oleh kepentingan politik. Eugene Bardach dalam Agustino (2004:138) mengatakan bahwa membuat program atau kebijakan yang terlihat baik di atas kertas itu mudah, namun merumuskannya menjadi kata-kata atau slogan yang menarik bagi pemimpin dan pemilih itu lebih sulit. Yang lebih sulit lagi adalah melaksanakannya dengan cara yang memuaskan semua pihak, termasuk mereka yang dianggap sebagai klien. Berdasarkan hal ini, implementasi kebijakan bisa sangat rumit dan penuh tantangan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2004:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan yang biasanya berbentuk undang-undang, perintah, keputusan eksekutif, atau keputusan badan peradilan lainnya. Keputusan-keputusan ini biasanya mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang ingin dicapai, dan cara untuk melaksanakan

kebijakan tersebut. Sementara itu, Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2004:139) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan mencakup tiga hal penting: (1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) Adanya aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, dan (3) Adanya hasil dari kegiatan tersebut. Penerapan kebijakan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Pencapaian tujuan tersebut berkaitan dengan efektivitas.

Efektivitas kebijakan adalah pengukuran terhadap tercapainya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Efektivitas implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana implementasi yang dilakukan dapat mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Riant Nugroho (2012:107-110) mengemukakan bahwa ada lima "tepat" yang perlu dipenuhi dalam hal efektivitas implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Tepat kebijakan, dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada dapat mengatasi masalah yang ingin diselesaikan. Apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan sesuai untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu, penting untuk memastikan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang

memiliki kewenangan atau misi kelembagaan yang sesuai dengan karakter kebijakan tersebut.

- b. Tepat pelaksanaannya, ada tiga pihak yang dapat bertindak sebagai pelaksana, yaitu pemerintah, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat / swasta / penerapan yang bersifat monopoli.
- c. Tepat target, apakah target yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa target tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang sedang diterapkan, sehingga tidak terjadi konflik atau ketidaksesuaian antara berbagai kebijakan.
- d. Tepat lingkungan, dalam hal ini lingkungan dibagi menjadi 2 yaitu lingkungan internal yang berhubungan dengan lembaga terkait dan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pendapat publik terkait kebijakan dan implementasinya.
- e. Tepat proses, terdiri atas tiga proses, yaitu *policy acceptance*, masyarakat memandang kebijakan sebagai aturan dan pemerintah memandang sebagai kewajiban yang harus dilakukan. *Strategic Readiness*, dimana masyarakat bersedia melakukan serta menjadi bagian dalam kebijakan dan birokrat bersedia menjadi pelaksana.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam suatu proses kebijakan. Pelaksanaannya melibatkan berbagai kegiatan yang rumit. Keberhasilan

kebijakan dapat dilihat dari proses yang dijalankan dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.2.5 Peran Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

Salah satu variabel dalam implementasi adalah sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Pemangku kepentingan merupakan salah satu jenis sumber daya manusia dalam implementasi. Menurut Kadiwaraka dalam (Kismartini et al., 2019) *stakeholders* adalah semua pihak baik secara individu, maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan/atau mempengaruhi pengambilan keputusan serta pencapaian tujuan suatu kegiatan. Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang berkepentingan dengan perkembangan suatu organisasi atau komunitas. Freeman dalam Gudono (2017:258) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau kemungkinan memengaruhi upaya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa kelangsungan hidup suatu organisasi dalam lingkungannya bergantung pada berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya pemilik dan manajemen, tetapi juga pemerintah, karyawan, kreditor, konsumen, dll. Organisasi muncul bukan hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan di lingkungannya.

Bryson (2004:21) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai individu atau kelompok yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau yang dapat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.

Hal ini dapat terjadi melalui kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan. Mereka dapat berupa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial-ekonomi, atau berbagai jenis organisasi di semua lapisan masyarakat. Masing-masing kelompok ini memiliki sumber daya dan kebutuhannya sendiri yang harus tercermin dalam proses pengambilan keputusan pembangunan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan (*Stakeholders*) adalah individu yang bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah regulasi atau kebijakan agar tercapai tujuannya. Stakeholders sendiri dapat dikalsifikasikan berbagai cara. Menurut Maryono (dalam Yosevita, 2015) mengklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. Stakeholder primer, yaitu *stakeholder* yang terkena dampak atau pengaruh secara langsung dan memiliki kepentingan yang pokok
2. *Stakeholder* kunci, yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan, pengaruh, dan kepentingan yang cukup penting secara legalitas dalam menentukan keputusan kebijakan (N. C. Hidayat et al., 2020).
3. *Stakeholder* sekunder (Pendukung), yaitu *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan secara langsung namun tetap berkaitan terhadap konteks yang terjadi. Stakeholder pendukung menjadi fasilitator dalam proses pembangunan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

Peran merupakan aspek dinamis dari suatu situasi, yaitu seseorang memenuhi hak dan tanggung jawabnya (Soekanto, 2013:217). Layaknya

pekerjaan, peran memiliki dua makna. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda yang berasal dari model sosial mereka. Ini juga berarti bahwa peran menentukan siapa mereka di masyarakat dan kesempatan yang diberikan masyarakat kepada mereka. Pentingnya peran terletak pada kemampuannya untuk mengatur perilaku seseorang. Peran memungkinkan seseorang untuk memprediksi tindakan orang lain, sampai batas tertentu. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

Menurut Hendropuspito dalam Rahmat (2009:37), identitas adalah konsep sederhana yang mendefinisikan posisi atau peran seseorang dan dibangun berdasarkan pencapaiannya. Posisi adalah konsep yang menggambarkan apa yang dilakukan seseorang atau kelompok. Signifikansi adalah keberadaan aktivitas yang dilakukan individu atau kelompok yang berkaitan dengan peran atau posisi mereka dalam masyarakat. Menurut Supriyadi dalam Rahmat (2009:36–37), hak adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang memiliki hak. Sementara itu, status itu sendiri merupakan posisi individu dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Ini berarti bahwa status dan peran merupakan dua aspek dari fenomena yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah penerapan hak dan kewajiban tersebut.

Setiap pemangku kepentingan memiliki peran spesifik dalam pembuatan kebijakan. Memahami peran-peran ini penting untuk menentukan aktor mana yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam suatu proyek atau program tertentu. Para ahli telah mengembangkan berbagai teori tentang peran para pemangku kepentingan, diantaranya:

a. Menurut Nugroho (Riant, 2014) dalam peran *stakeholders* dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu:

1. *Policy Creator*; yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam menentukan dan mengambil keputusan pada suatu kebijakan,
2. Koordinator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam upaya koordinasi kepada *stakeholder* lain yang ikut berperan dalam proses kebijakan melalui proses kerjasama yang terjadi,
3. Fasilitator, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran menyiapkan apa saja yang dibutuhkan dalam proses implementasi tersebut, dan apa saja fasilitas yang diberikannya,
4. Implementor, yaitu *stakeholder* yang memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dimana kelompok sasaran termasuk didalamnya,
5. Akselerator, yaitu *stakeholder* yang berperan dalam menunjang keberjalanan (kontribusi) suatu kebijakan yang dapat memberikan dampak untuk mempercepat pelaksanaan dari target awal pencapaiannya.

b. Menurut Kuncoro dalam Arifin (2017:5) menyatakan bahwa peran pemerintah dapat menjadi peran - peran coordinator, fasilitator dan stimulator.

1. Koordinator: Pemerintah daerah dapat memainkan peran koordinasi dalam merumuskan pedoman pembangunan daerah dan mengembangkan rencana pembangunan. Beberapa daerah memiliki program pembangunan ekonomi daerah, dan salah satu pendekatannya adalah mengembangkan program melalui perjanjian kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil.
2. Sebagai fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan dengan membenahi lingkungan di wilayahnya, antara lain melalui pengefisienan proses pembangunan, penyempurnaan prosedur perencanaan, serta penetapan peraturan yang lebih baik.
3. Stimulator, Pemerintah daerah dapat mendorong terciptanya dan berkembangnya kegiatan usaha melalui berbagai langkah khusus yang dirancang untuk menarik perusahaan-perusahaan baru agar berinvestasi di wilayahnya serta mempertahankan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Berbagai fasilitas dapat disediakan untuk menarik pelaku usaha di sektor ekonomi, dan pemerintah daerah dapat mempromosikan hal tersebut.

Dengan memperhatikan bagaimana proses penerapannya kita dapat menilai apakah peran para stakeholder ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, dan apakah terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi peran mereka. Berdasarkan berbagai model teori Peran *stakeholder*, peneliti memilih teori peran stakeholders oleh Nugroho untuk diterapkan dalam penelitian ini. Khususnya terkait dengan Peran Stakeholders dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang.

Tabel 1.2 Komparasi Teori Peran Stakeholder

No	Teori Peran Stakeholder	Fokus Utama	Kekurangan Utama
1.	Nugroho et al (2014)	Peran pemangku kepentingan dalam konteks pembangunan/program, kedalam lima peran yaitu pembuat kebijakan, coordinator, fasilitator, pelaksana, dan akseletaror.	Meskipun klasifikasi peran pemangku kepentingan (pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, akselerator) menurut Nugroho cukup jelas dan berguna untuk membagi tugas dalam suatu program atau kebijakan publik, teori ini kadang-kadang mengasumsikan semua pemangku kepentingan mempunyai kemampuan yang sama — padahal di lapangan, tidak semua pihak memiliki sumber daya, kewenangan, jaringan, dan kapasitas untuk menjalankan semua jenis peran dengan efektif.
2.	Kuncoro dalam Arifin (2017:5)	Peran pemerintah terbagi menjadi beberapa tingkatan: peran minimal, peran antara, dan peran aktif. Kuncoro mengklasifikasikan peran pemerintah	Terkadang peran aktif sulit diwujudkan di lingkungan yang terbatas. Dan hanya fokus pada pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama.

No	Teori Peran Stakeholder	Fokus Utama	Kekuarangan Utama
		menjadi wirausaha (entrepreneur), koordinator, fasilitator, dan stimulator	

Berdasarkan tabel komparasi teori Peran *Stakeholder* tersebut, peneliti menggunakan teori dari Nugroho dengan mempertimbangkan penataan pedagang kaki lima melibatkan banyak pihak dengan fungsi dan tanggung jawab yang berbeda — mulai dari pemerintah yang membuat kebijakan, petugas yang mengatur dan mengawasi, masyarakat sekitar yang terkena dampak, hingga para pedagang itu sendiri. Dengan teori Nugroho, kita bisa mengklasifikasikan siapa yang bertindak sebagai pembuat kebijakan (pengambil kebijakan), koordinator antar lembaga, fasilitator yang pelaksana yang menjalankan kebijakan di lapangan, dan akselerator yang mempercepat proses agar pengaturan bisa berjalan cepat dan efektif. peran spesifik yang dijalankan dan bagaimana kontribusi tiap pemangku kepentingan terhadap keberhasilan penyelenggaraan PKL di Jalan Surya Kencana.

1.5.2.6 Faktor Pendorong dan Penghambat

Faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan dan penataan suatu wilayah dapat bervariasi tergantung berbagai faktor seperti tujuan, Lokasi, infrastruktur, dan lain-lain (Mani & Trimo, 2021). Peran stakeholders dalam suatu pemerintahan atau organisasi bisa dipengaruhi

oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat menurut Destiana, Rizka tahun 2020 diantara lain:

1) **Faktor Pendukung**, yaitu faktor-faktor yang dapat emndorong berbagai pihak kepentingan untuk dapat terlihat secara aktif dalam peengembangan suatu kebijakan. Faktor pendukung ini dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Nilai, adalah suatu keuntungan atau kepentingan yang dimiliki oleh individual atau kelompok yang terlibat atau terkait dengan suatu organisasi, proyek, atau entitas tertentu. Nilai-nilai ini memiliki peran penting dalam peran stakeholders di suatu organisasi atau proyek. Nilai-nilai yang dianut dan dipraktikkan oleh aktor dapat dipengaruhi oleh prilpenulis, Keputusan yang diambil, dan hubungan antara mereka. Adapun gejala yang diamati yaitu:

1. Nilai Individual, peran aktor sebagai penggerak dalam pengembangan kebijakan.
2. Nilai organisasi, hubungan kerjasama aktor dalam pengembangan kebijakan.
3. Nilai kepentingan umum, kesesuaian sasaran dari adanya suatu kebijakan yang berlaku.
4. Nilai legalitas, adanya regulasi atau aturan yang mendukung aspek kerjasama aktor.

5. Nilai profesionalitas, kemampuan dan komitmen aktor dalam melaksanakan kebijakan.

b) Komunikasi, adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan individu, kelompok dengan menggunakan metode kata-kata, suara, gambar, tulisan atau gestur. Komunikasi merupakan faktor penting dalam peran stakeholders di organisasi atau proyek. Komunikasi yang efektif memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan yang baik, mendorong kolaborasi, dan memastikan pemahaman yang jelas diantara semua pihak yang terlibat. Dalam aspek komunikasi ini terdapat gejala yang diamati diantaranya adalah:

1. Frekuensi komunikasi, merupakan Tingkat komunikasi antara aktor dengan entitas.
2. Kualitas hubungan, aktor saling memahami tujuan, visi dan misi dari suatu kebijakan.
3. Kemampuan penyelesaian konflik, dapat berupa kemampuan aktif atau stakeholders dalam menyelesaikan adanya suatu konflik dalam kebijakan tersebut.

2) **Faktor Penghambat**, yaitu faktor atau hambatan dalam keterlibatan aktif dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam usaha pengembangan suatu kebijakan. Dalam faktor penghambat ini tentunya ada dua aspek yang mempengaruhi diantaranya adalah:

- a) Kepercayaan, adalah istilah kompleks yang mencakup keyakinan, pandangan, dan sikap individu terhadap orang lain atau situasi tertentu. Faktor kepercayaan memiliki peran yang cukup krusial dalam hubungan antara peran stakeholders dalam suatu organisasi atau proyek. Kepercayaan yang kuat dapat mempengaruhi kolaborasi yang efektif, komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang saling menguntungkan. Adapun beberapa aspek yang diamati untuk menilai aspek kepercayaan ini adalah diantaranya:
1. Kerjasama yang aktif, aktor terkait aktif berkolaborasi maupun berpartisipasi dalam suatu kebijakan yang dapat membangun kepercayaan.
 2. Pendekatan terbuka dan transparansi, aktor terkait dapat memberikan akses terbuka dalam memberikan informasi.
 3. Kepatuhan pada kesepakatan, aktor dapat mematuhi kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat.
 4. Keterbukaan dalam penanganan masalah, aktor mampu mengatasi masalah dengan keterbukaan dan tanggungjawab.
- b) Kebijakan, adalah seperangkat tindakan, aturan atau petunjuk yang disusun untuk memberikan panduan dan arahan dalam mengatur sesuatu. Faktor kebijakan memiliki peran yang krusial dalam peran stakeholders di suatu organisasi atau proyek. Kebijakan yang baik dan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

kolaborasi, partisipasi, dan kontribusi aktor. Adapun gejala yang diamati pada aspek kebijakan ini antara lain;

1. Kesesuaian kebijakan, aktor mampu menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan kebijakandan aturan yang berlaku.
2. Partisipasi dalam pembentukan kebijakan, aktor mampu berperan aktif dalam proses pembentukan kebijakan.
3. Pelaporan dan pengukuran kinerja, pelaporan ini pastinya berkaitan dengan kebijakan.

Berdasarkan faktor penghambat oleh Destiana dan rizka tersebut, pelaksanaan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung seperti koordinasi antar pihak terkait, ketersediaan sumberdaya, komunikasi yang efektif, serta partisipasi masyarakat. Sebaliknya faktor penghambat dapat muncul apabila lemah koordinasi, keterbatasan sdm, resistensi dari pelpenulis kebijakan atau masyarakat serta kurangnya komitmen stakeholders yang berwenang.

Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut menjadi relevan dengan penataan PKL di Jalan Surya Kencana Pamulang tidak hanya ditentukan oleh kebijaka pemerintah semata, tetapi juga sejauh mana para stakeholders seperti pemda, aparat penegak perda, pedagang kaki lima, dan masyarakat sekitar dapat bersinergi mencapai tujuan penataan yang tertib dan berkeadilan. Dengan demikian teori ini membantu peneliti mengidentifikasi elemen-elemen yang mendukung dan menghambat peran stakeholders dalam penataan pedagang kaki lima, sehingga dapat dianalisis secara

komprehensif penyebab terwujud atau tidaknya implementasi kebijakan secara optimal di Lokasi penelitian.

1.5.2.7 Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang menjalankan usahanya dari tempat usaha yang bergerak maupun tetap, dengan memanfaatkan prasarana perkotaan, fasilitas sosial, fasilitas umum, tanah, dan bangunan milik pemerintah dan/atau perusahaan swasta, yang bersifat sementara maupun tidak permanen (Mubin, n.d.). Widjajanti (2012:40) menjelaskan bahwa PKL adalah salah satu bentuk kegiatan informal yang dalam aktifitasnya seringkali memanfaatkan Lokasi yang tidak seharusnya untuk berjualan. Tempat- tempat tersebut contohnya adalah jalan, trotoar, dan amperan toko. PKL pada umumnya adalah self employed yang berarti mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relative tidak terlalu besar, terbagi atas modal tetap serta modal kerja.

Penataan Kawasan adalah suatu bentuk rekayasa sosial yang dilakukan untuk memberikan kondisi yang lebih global dengan mengedepankan kualitas lingkungan hidup (Hamzenz , 2013). Guna mempertahankan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan lebih baik lagi tersusunlah Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 tahun 2012 yang menjadi *politic will* yang dimiliki pemerintah dalam upaya memperhatikan PKL dengan terus melakukan koordinasi terkait penataan serta pemberdayaan PKL. Adanya penataan ini diharapkannyab bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi para PKL.

Perpres tersebut menjadi dasar legalitas dalam pelaksanaan penataan terhadap PKL. Penataan serta pemberdayaan ini kemudian menjadi tugas serta tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi setiap PKL yang akan diberdayakan. Dari Perpres tersebut kemudian tersusunlah Permendagri No. 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL. Dalam Permendagri tersebut berisi amanat kepada pemerintah kota atau daerah harus bertanggungjawab untuk melaksanakan penataan serta pemberdayaan PKL. Didasari dari peraturan-peraturan tersebut, yang berkaitan dengan penataan lebih lanjut tercantum dalam Perda Kota Tangerang Selatan No. 8 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

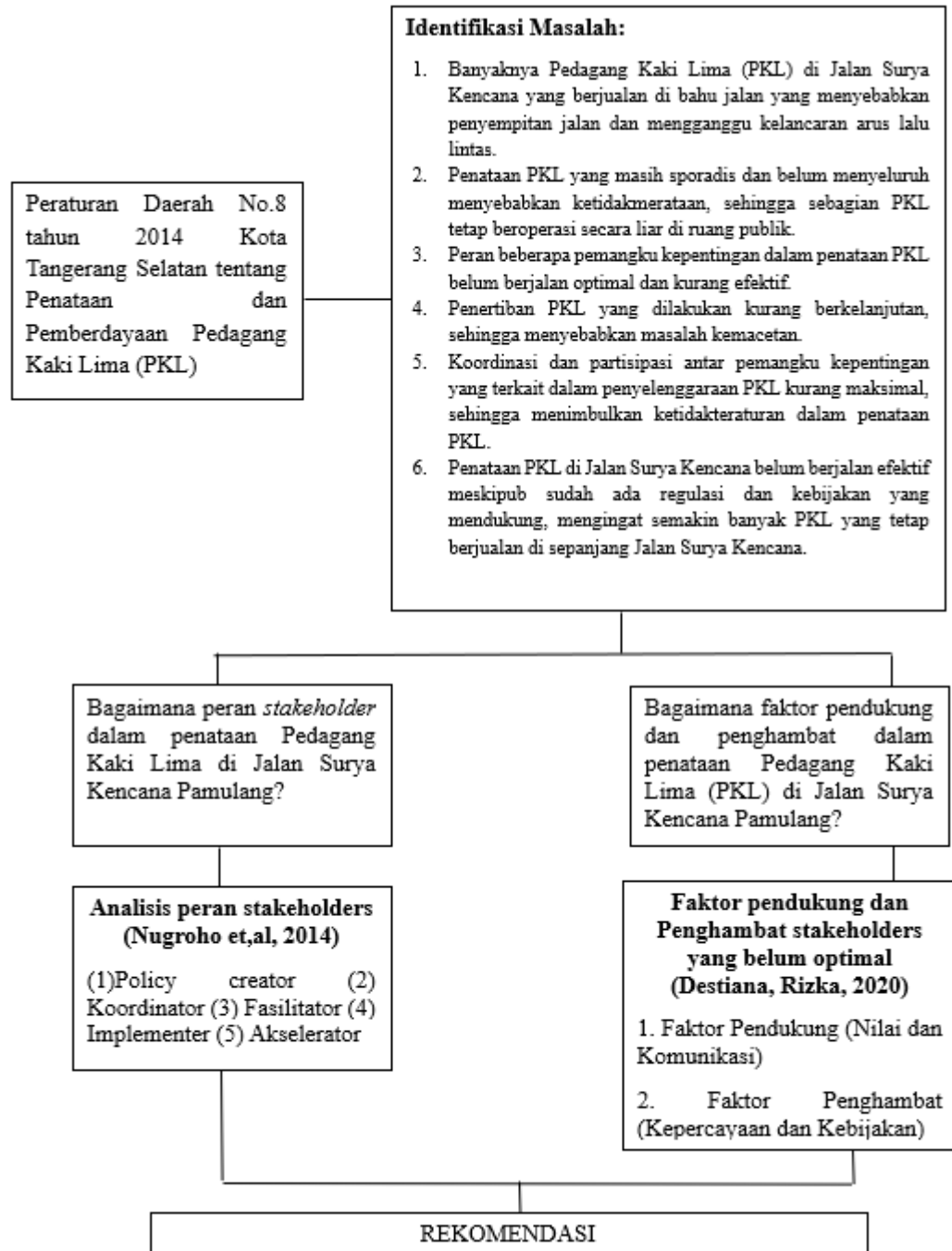
Berdasarkan Perda No.8 tahun 2014 Kota Tangerang Selatan, penataan PKL dilakukan melalui beberapa Langkah yaitu:

1. Melakukan pendataan PKL
2. Melakukan pendaftaran PKL yang dilakukan oleh SKPD terkait.
3. Penetapan Lokasi PKL, dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, Kesehatan, kebersihan lingkungan dan rencana tata ruang.
4. Pemindahan Lokasi PKL, apabila PKL menempati tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
5. Peremajaan lokasi PKL untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas.

Apabila berbicara terkait Pembangunan bahwa penataan pada sektor informal menjadi sebuah keharusan. Proses Pembangunan harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang berorientasi kepada masyarakat juga.

Berdasarkan penjelasan terkait penataan dan PKL, dapat ditarik Kesimpulan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan kepada sekelompok pedagang yang berjualan dipinggir jalan dengan cara pendataan, pendaftaran, penetapan, pemindahan apabila tidak sesuai dan peremajaan PKL agar dapat tercipta lingkungan yang teratur serta meningkatkan fungsi sarana dan prasarana daerah.

1.5.3 Kerangka Berpikir



Gambar1.3 Kerangka Berpikir

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Peran Stakeholders dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Surya Kencana Pamulang

Operasionalisasi konsep merupakan konsep dari operasionalisasi suatu penelitian Dimana menjelaskan penjabaran interpretasi indicator-indikator yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk menjawab tujuan penelitian.

Analisis peran *stakeholders* dalam penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Surya Kencana Pamulang adalah upaya menganalisis *stakeholders* berdasarkan perannya yang dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu *policy creator*, *coordinator*, fasilitator, implementor, dan akselerator.

Fokus dari penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan analisis mengenai peran setiap *stakeholders* yang berperan dalam Penataan Pedagang Kaki Lima melalui fenomena yang sudah peneliti tuliskan. Dalam operasionalisasi konsep ini, peneliti menjelaskan fenomena apa yang akan digunakan oleh peneliti dalam menganalisis peran *stakeholders* dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Surya Kencana Pamulang.

Tabel 1.3 Operasionalisasi konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Bagaimana Peran Stakeholders dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan	<i>Policy Creators</i>	- Kejelasan adanya kebijakan - Posisi dan kedudukan setiap <i>stakeholders</i> dalam

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Surya Kencana Pamulang		penyusunan kebijakan. - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> .
	Koordinator	- Pihak mana yang menjadi koordinator utama. - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> . - Proses pelaksanaan koordinator - Bentuk kerjasama yang dilakukan.
	Fasilitator	- Pihak mana yang menjadi fasilitator utama - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> - Bentuk fasilitas yang disediakan.
	Implementor	- Pihak mana yang menjadi implementor utama - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> .
	Akselerator	- Pihak mana yang menjadi akselerator utama. - Tugas dan fungsi <i>stakeholders</i> . - Langkah percepatan

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

1.6.2 Faktor Pendukung dan Penghambat

Peran aktor dalam melakukan Penataan Pedagang Kaki Lima di Jalan Surya Kencana Pamulang dapat dilakukan dengan baik, namun pastinya terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat proses tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Destiana, Rizka adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong
 - a) Nilai
 - b) Komunikasi
2. Faktor Penghambat
 - a) Kepercayaan
 - b) Kebijakan

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
Faktor Pendukung	Nilai	- Peran aktor sebagai pelaksana dalam penataan PKL. - Nilai Individu, hubungan kerjasama aktor dalam pelaksanaan penataan PKL. - Nilai profesional, kesesuaian sasaran dari adanya suatu kebijakan yang berlaku - Nilai legalitas, adanya regulasi atau

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
		aturan yang mendukung aspek kerjasama aktor. - Nilai organisasi, kemampuan dan komitmen aktor dalam melaksanakan kebijakan.
	Komunikasi	- Tingkat komunikasi antara aktor dengan masyarakat. - Kualitas hubungan aktif Dimana saling memahami tujuan visi dan misi dari suatu kebijakan. - Kemampuan aktor dalam menyelesaikan adanya konflik.
Faktor Penghambat	Kepercayaan	- Aktor terkait aktif berkolaborasi maupun berpartisipasi dalam suatu kebijakan yang dapat membangun kepercayaan. - Aktor terkait dapat memberikan akses terbuka dalam penyampaian informasi atau aduan permasalahan. - Kemampuan aktor dalam mematuhi kesepakatan dan perjanjian serta

Fenomena	Gejala	Sub Gejala
		penyelesaian permasalahan.
	Kebijakan	- Aktor mampu menjalankan suatu kebijakan sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku. - Pengukuran kinerja dan pelaporan berkaitan dengan kebijakan.

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang kompleks dan multidimensi seputar keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Surya Kencana, Pamulang, Tangerang Selatan, yang secara signifikan mempengaruhi tata ruang dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Fenomena ini menjadi penting untuk diteliti karena keberadaan PKL yang masif tidak hanya mengatasi dinamika ekonomi masyarakat informal, tetapi juga menimbulkan persoalan klasik seperti kemacetan lalu lintas, ketidakteraturan penggunaan ruang publik, hingga konflik sosial antar pelpenulis dan pemangku kepentingan. Di satu sisi, PKL memberikan kontribusi penting ekonomi melalui aktivitas perdagangan yang melayani kebutuhan masyarakat luas, namun di sisi lain, kehadiran mereka jika tidak diatur dengan baik dapat menyebabkan gangguan terhadap keselamatan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan serta penghuni lingkungan sekitar.

Meskipun pemerintah daerah Tangerang Selatan telah menetapkan kebijakan dan peraturan terkait penataan PKL, seperti Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 dan Perpres No. 125 Tahun 2012 yang mengatur koordinasi, relokasi, dan pemberdayaan PKL, pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan besar. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain resistensi dari para PKL yang enggan direlokasi atau merasa kebijakan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, kurangnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait, serta keterbatasan sumber daya dan dukungan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini menyebabkan sejumlah lokasi, terutama di Jalan Surya Kencana, masih dipenuhi oleh PKL yang berjualan secara liar di trotoar dan bahu jalan, sehingga memperparah kemacetan dan konflik penggunaan ruang publik. Penelitian ini memandang bahwa berbagai permasalahan tersebut bukan hanya masalah teknis penataan fisik, melainkan juga masalah sosial dan manajerial yang erat kaitannya dengan pengelolaan konflik dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Dalam kerangka pemikiran ini, penelitian mengambil analisis pendekatan dan interaksi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah (seperti Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan Kecamatan), PKL sebagai pelaku usaha informal, serta masyarakat sekitar sebagai pengguna ruang publik. Argumen utama dari penelitian ini adalah bahwa peran aktif dan sinergi efektif antar pemangku kepentingan sangat krusial dalam mencapai proses penataan PKL yang menyeluruh, berkelanjutan, dan adil. Dengan mengoptimalkan

koordinasi, partisipasi, serta komunikasi yang konstruktif antara semua pihak, tidak hanya akan dapat mengurangi konflik dan gangguan di ruang publik, tetapi juga dapat mendorong pemberdayaan PKL agar dapat beroperasi secara legal dan tertib tanpa kehilangan sumber penghidupan. Argumen ini diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan tingginya jumlah PKL di kawasan tersebut serta tekanan yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, yang memicu kebutuhan mendesak sebagai solusi manajemen ruang publik yang lebih baik.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penelitian yang ada sebelumnya seringkali kurang spesifik dalam mengkaji dinamika dan solusi kontekstual yang tepat di lokasi tertentu seperti Jalan Surya Kencana. Oleh karena itu, studi pendekatan ini memberikan kontribusi baru dengan fokus pada pemetaan pemangku kepentingan secara komprehensif serta faktor pendukung dan penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan penataan PKL di lapangan. Melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi strategi pengelolaan dan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi lokal. Dengan demikian, argumen penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek regulasi dan penataan fisik, tetapi juga pada model pengembangan kolaboratif yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi informal dengan kebutuhan keteraturan dan keinginan ruang publik, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak yang terlibat dan menciptakan ruang perkotaan yang lebih tertata dan harmonis.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian metode Kualitatif merupakan serangkaian proses yang dilakukan dalam mendapatkan hasil yang berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut (Sugiyono, 2019) dalam mengartikan metode penelitian kualitatif sebagai metode baru. Metode kualitatif sering disebut metode *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif seringkali digunakan untuk menemukan dan memahami fenomena-fenomena kompleks dan multifaset ini yang dapat menemukan dan memahami makna atau hal hal yang tidak terlihat dalam suatu fenomena yang susah untuk ditafsirkan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk merangkum dan menjabarkan berbagai kondisi, peristiwa, atau fenomena dalam realitas sosial masyarakat yang diteliti. Menurut (Moleong, 2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut (Hendryadi et al., 2019) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang

mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif terhadap data yang dikumpulkan pada suatu bidang yang spesifik dan unik untuk mengembangkan hipotesis atau teori yang dapat disebarkan secara luas. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menjawab dan mendapatkan hasil atas permasalahan yang berkaitan dengan fenomena sosial. Untuk menghindari pengukuran dan perbandingan variabel satu sama lain, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berupa dokumen, catatan, dan catatan dari penelitian dari lapangan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, satu-satunya variabel yang dipertimbangkan pada penelitian ini adalah Manajemen Konflik terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Surya Kencana Pamulang.

1.8.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Fokus penelitian ini merujuk pada area yang menjadi perhatian atau Lokasi utama dalam suatu penelitian dan harus dijelaskan secara jelas agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Fokus ini menggambarkan inti dari penelitian tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini fokus utamanya adalah peran stakeholders pada Penataan Pedagang Kaki Lima di Jl. Surya Kencana. Adapun Lokasi penelitiannya yaitu mencakup sepanjang Jl. Surya Kencana Pamulang, Kecamatan Pamulang Barat.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada informan yang terlibat dalam penelitian. Pemilihan informan yang tepat sangat penting untuk mendukung kelancaran proses penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah *non-probability sampling* dan *purposive sampling* (sampel bertujuan). Menurut (Sugiyono, 2019), *purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan tujuan tertentu, di mana sampel dipilih karena dianggap dapat mewakili dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, merupakan stakeholders yang menjalankan kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima.
- b) Kelurahan Pamulang Barat, lurah memiliki Gambaran yang komprehensif terhadap penataan Pedagang Kaki Lima di sepanjang JL. Surya Kencana. Beliau dapat memberikan Gambaran umum tentang manajemen yang telah dilakukan untuk melakukan penertiban PKL selain itu lurah juga memiliki akses terhadap data-data yang relevan dan dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang manajemen konflik yang dilakukan secara kesuluruhan.
- c) Satpol PP, Satpol PP Wilayah Pamulang Barat memiliki pengetahuan yang lebih dalam dikarenakan, mereka yang bertugas untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima di wilayah tersebut. Beliau dapat memberikan informasi yang lebih detail terkait manajemen di

lapangannya. Selain itu, beliau juga dapat memberikan Gambaran tentang koordinasi antara stakeholders.

- d) Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sepanjang Jl. Surya Kencana. Para pedagang adalah sebagai objek utama dalam penelitian ini. Para PKL ini dapat menjadi narasumber yang memberikan informasi terkait bagaimana penertiban terhadap penataan Tata Ruang Kota yang dilakukan oleh Pemerintah, serta PKL ini juga dapat memberikan sudut pandang plus dan minus dari penataan tersebut.
- e) Pengguna Jalan, pengguna jalan yang dimaksud dapat seorang pengendara motor/mobil yang terkena dampak terkait maraknya Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jl. Surya Kencana Pamulang ini. Mereka dapat memberikan informasi dan menjelaskan terkait apa saja yang dirasakan serta dampak yang diberikan dengan adanya Para PKL tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling* dengan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2014), *snowball sampling* adalah metode pemilihan sampel yang dimulai dengan sejumlah kecil individu dan kemudian berkembang. Peneliti memilih teknik ini karena pada tahap awal, hanya satu atau dua orang yang dipilih sebagai sampel. Namun, karena data yang diperoleh masih dianggap kurang lengkap, peneliti kemudian mencari individu lain untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

1.8.4 Jenis Data

Menurut Sugiyono (2015), jenis data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berupa kualitatif dan kuantitatif. Dari dua jenis data tersebut, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Yang Dimana data pada penelitian kualitatif ini berbentuk skema, kata, dan gambar yang Dimana pada penelitian ini beruoa nama dan Alamat.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran *stakeholders* dalam penataan Pedagang Kaki Lima di JL. Surya Kencana Pamulang, yang berhubungan dengan tata ruang kota wilayah Pamulang. Dengan memakai pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali makna, persepsi, dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan tersebut. Data kualitatif yang berupa kata – kata, narasi, dan deskripsi akan digunakan untuk menggambarkan secara rinci kompleksitas kebijakan di lapangan.

1.8.5 Sumber Data

Pada sebuah penelitian data yang digunakan adalah data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka - angka yang membuktikan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Sumber data penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2019) data primer adalah sumber informasi yang secara langsung memberikan data kepada pengumpulnya. Biasanya, jenis data ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa sumber yang dapat dipercaya. Data primer akan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan berbagai informan. Wawancara ini akan menggali pemahaman, pengalaman, dan perspektif mereka mengenai pedagang kaki lima yang mungkin menjadi faktor kemacetan di JL. Surya Kencana Pamulang.

b) Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2019), data sekunder adalah sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui pihak ketiga atau dokumen. Contohnya, data sekunder dapat diperoleh melalui pihak ketiga atau analisis terhadap dokumen yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari literatur, artikel, jurnal, dan situs-situs internet yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data sekunder ini akan diambil dari berbagai dokumen seperti laporan data jumlah Pedagang Kaki Lima Aktif di Pamulang, kebijakan pemerintah, dan literatur terkait. Data sekunder ini akan digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas dan untuk memvalidasi temuan dari data primer.

Penggabungan kedua jenis data ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai peran stakeholders dalam penataan Pedagnag Kaki Lima di JL. Surya Kencana Pamulang, berbagai tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa Teknik dalam pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Wawancara

Merupakan sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari wawancara. Menurut (Moleong, 2017)wawancara adalah kegiatan melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memahami dan memiliki pengetahuan terkait pokok permasalahan, seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya tentang subjek penelitian. Wawancara merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menggali data melalui interaksi langsung.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap fenomena sosial dan psikis secara sistematis. Menurut (Kartono, 1980)observasi bertujuan memahami karakteristik perilaku manusia dan hubungannya dengan fenomena sosial dalam konteks budaya tertentu. Dalam penelitian ini,

observasi dilakukan untuk menilai bagaimana peran stakeholders ini berperan penting dalam penataan ruang kota di Pamulang terkhususnya JL. Surya Kencana yang Dimana jalan tersebut sangat amat sering terjadi. Pada metode ini mencakup faktor pendukung dan penghambat implementasinya.

3. Dokumentasi

(Gottschalk, 2014) menyebutkan bahwa dokumen adalah sumber informasi tertulis yang berperan dalam merekam sejarah, berbeda dari kesaksian lisan, artefak, atau peninggalan arkeologis. Contohnya meliputi surat resmi, perjanjian, undang-undang, dan hibah. Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup catatan kegiatan, laporan kerja, serta materi terkait lainnya yang mendukung analisis isu yang dibahas.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan materi data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku – buku referensi dan bahan – bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2003)

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dalam penelitian kualitatif melibatkan interpretasi data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono, mengutip Miles dan Huberman, proses analisis bersifat interaktif hingga data jenuh

tercapai, sehingga hasilnya mudah dipahami dan disampaikan. Ada tiga langkah yang terlibat pada kegiatan analisis data. Diantaranya adalah:

1. Reduksi Data (*data reduction*) Prosedur memadatkan informasi dan menentukan elemen-elemen kunci yang selaras dengan pertanyaan penelitian disebut reduksi data. Proses yang rumit ini menuntut wawasan, keluasan, dan pemahaman. Intinya, reduksi data melibatkan merangkum, membuat prioritas, memfokuskan pada elemen-elemen penting, mengidentifikasi pola, dan menghilangkan informasi yang tidak relevan.
2. Penyajian data adalah langkah selanjutnya setelah reduksi data, di mana data diorganisasi untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Data disusun dengan cara yang mudah dipahami, biasanya dalam bentuk pola relasional. Dalam penelitian kualitatif, deskripsi singkat atau format serupa dapat digunakan untuk menyajikan data yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan.
3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh sering kali berupa temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Temuan tersebut dapat muncul sebagai penjelasan deskriptif atau gambaran yang lebih jelas tentang objek atau fenomena yang sebelumnya belum dipahami dengan jelas.

Pada hakikatnya analisis data kualitatif adalah suatu proses menemukan dan mengumpulkan informasi yang dikumpulkan secara sistematis melalui tahapan reduksi data (merangkum informasi), display data (menyajikan informasi pada suatu tampilan), dan verifikasi data (mengkonfirmasi/membuktikan informasi). Hal ini memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami dan berharga bagi orang lain.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengikuti standar kredibilitas agar penelitian yang dilakukan memiliki tingkat kebenaran data dan kepercayaan yang tinggi, sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Triangulasi adalah langkah yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data berdasarkan sumbernya. Ini berarti perlu dilakukan upaya perbandingan dan pemeriksaan berulang kali untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan penulisrat.

1. Triangulasi Sumber, Triangulasi sumber berguna sebagai pengujian kredibilitas data dengan memverifikasi data yang telah dikumpulkan melalui berbagai sumber.
2. Triangulasi Teknik, Untuk mengevaluasi keandalan data, teknik triangulasi melibatkan perbandingan data dari sumber yang sama dengan memakai berbagai pendekatan. Sebagai contoh, data yang dikumpulkan melalui wawancara dapat diperiksa lebih lanjut melalui observasi dan dokumentasi.